

## ABSTRAK

Safa Camila, 2024, *Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Penyelenggaraan Sumbangan Sosial Di Kecamatan Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Iain Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.

**Kata Kunci:** Analisis, Sumbangan Sosial, *Fiqh Siyasah*.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan maraknya aktifitas sumbangan sosial yang mengganggu ketertiban sehingga mengakibatkan ketidak nyamanan masyarakat. Aktifitas ini dilakukan oleh lembaga/badan dengan berbagai macam tujuan yakni untuk membantu korban bencana, pembangunan instansi, anak yatim bahkan untuk acara besar seperti Maulid Nabi SAW. Akan tetapi tidak sepenuhnya aktifitas ini dilakukan untuk membantu sesama melainkan untuk kepentingan pribadi dengan mengatas namakan badan/lembaga. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Pamekasan mengatur aktifitas sumbangan sosial berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial yang didalamnya terdapat aturan mengenai aktifitas sumbangan sosial.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yakni: *pertama*, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial dalam penyelenggaraan sumbangan sosial?. *Kedua*, bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang mana data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif yang mana bertujuan untuk mengetahui realitas sosial. Dalam penelitian ini penulis meneliti langsung pada pemangku kebijakan, saran kebijakan dan masyarakat setempat di Kecamatan Pamekasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial dalam penyelenggaraan Sumbangan sosial Di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan belum berjalan maksimal hal ini sebabkan kurangnya sosialisasi perangkat daerah kepada masyarakat terhadap peraturan tersebut dan Penyelenggara Sumbangan sosial yang tidak taat terhadap aturan. *Kedua*, Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial belum sesuai dengan hukum Islam, yakni *fiqh siyasah* yang mana minimnya rasa tanggung jawab pemerintah Kabupaten pamekasan sebagai *khalifah* Allah di muka bumi dan kurangnya rasanya hormat masyarakat kepada pemerintah daerah.